

Mengkaji Ulang Teori Kepanikan Moral dalam Situasi Kepanikan Moral Seksual di Era Digital

Dina Listiorini

Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta

Alamat : Jl. Babarsari No.44, Janti, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email : dina.listiorini@uajy.ac.id

Reviewing the Theory of Moral Panic in The Situation of Sexual Moral Panic in the Digital Age

ABSTRACT

This paper further reviews the Moral Panic Theory/TKM (Moral Panics Theory). This theory departs from sociological concepts that see conflict in society that departs from an issue that is dichotomously divided on the grounds of good and bad, right and wrong morality and is considered to have the potential to threaten national security in the long term. There are several linear stages in TKM in early TKM models initiated by Cohen (1972) and developed more or less similarly by Hall et al. (1978). Then came the constructionist model which was heavily influenced by Blumer's thinking. Technological developments and shifting issues from social problems such as motorcycle gangs, mugging and drugs to more sensitive social issues such as sexuality cause the dynamics and complexity of TKM analysis. The concepts of power and the role of the media, for example. This paper describes the initial concepts in TKM and its development in a situation of changing issues, power and development of mass media technology, which in the end must adapt to the existing situation.

Keywords: *sexual moral panic; the role of the media; Cohen.*

ABSTRAK

Tulisan ini mengulas lebih lanjut mengenai Teori Kepanikan Moral/TKM (*Moral Panics Theory*). Teori ini berangkat dari konsep-konsep sosiologis yang melihat adanya konflik di masyarakat yang berangkat dari sebuah isu yang terbelah secara dikotomis dengan alasan moralitas baik-buruk, benar-salah dan dianggap berpotensi mengancam keamanan nasional dalam jangka panjang. Ada beberapa tahap linear dalam TKM pada model-model awal TKM yang diinisiasi oleh Cohen (1972) dan dikembangkan kurang lebih sama oleh Hall dkk (1978). Kemudian muncul model konstruksionis yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Blumer. Perkembangan teknologi dan pergeseran isu dari masalah sosial seperti geng motor, penjahretan dan *drug* ke masalah sosial yang lebih sensitif seperti seksualitas menyebabkan dinamika dan kompleksitas analisis pada TKM. Konsep-konsep kekuasaan dan peran media, misalnya. Studi ini menjelaskan konsep-konsep awal dalam TKM dan perkembangannya dalam situasi perubahan isu, kekuasaan dan perkembangan teknologi media massa, yang pada akhirnya harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada.

Kata kunci: kepanikan moral seksual; peran media; Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami sedikitnya tiga kali situasi kepanikan moral seksual (Heryanto, 2009, Wieringa, 2009, Wieringa dan Katjasungkana, 2019). Ketiga situasi didasarkan pada beberapa hal, antara lain adanya pro dan kontra yang luar biasa pada orang atau kelompok pada suatu masa yang dianggap memicu terjadinya situasi kepanikan moral; kemudian dalam situasi kepanikan moral tersebut muncul diskursus bahwa situasi yang dialami mencekam, membahayakan moral bangsa; sehingga harus ada tindakan hukum dalam bentuk aturan legal seperti Undang-undang atau peraturan hukum yang dianggap mampu mengatasi situasi itu. Tiga situasi kepanikan moral seksual yang pernah terjadi di Indonesia adalah pertama, kasus Gerwani. Narasi mengenai Gerwani pada 1965 yang konon "menghabisi" nyawa para Jenderal di Lubang Buaya – dan sesudahnya menari-nari sambil telanjang dan menyanyi lagu *Genjer-Genjer* (Wieringa, 2014) -- menjadikan Gerwani dinyatakan sebagai salah satu organisasi terlarang di Indonesia.

Selama puluhan tahun bahkan setelah mundurnya Soeharto, kata-kata "PKI" dan "Gerwani" menimbulkan ketakutan tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah Orde Baru menyiapkan dua dasar hukum bagi kasus PKI yaitu pertama, berupa Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi

PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme; kedua adalah pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Kepanikan moral seksual Gerwani ini menurut Wieringa dan Katjasungkana (2019) berhubungan secara paralel dengan kasus kepanikan moral "LGBT" yang berawal pada 2016. Organisasi perempuan di bawah Partai Komunis Indonesia dan dinyatakan terlarang itu mendapatkan kampanye hitam melalui pernyataan Ketua Kowani Ine Soekarno di acara "Gaung Demokrasi" April 1999 bahwa Gerwani mendukung lesbianisme dan berupaya menjalankan kompleks pelacuran (Wieringa, 2010).

Kasus kedua adalah "pornoaksi" awal 2000-an yang dihebohkan dengan konflik penyanyi dangdut Inul Daratista dan H. Rhoma Irama (Allen, 2007; Bellows, 2011, Barker, 2018). Gaya dangdut "Goyang Ngebor" Inul menjadi pro dan kontra dengan alasan moralitas agama dan masyarakat. Masyarakat pecinta musik dangdut pun terbelah menjadi dua yaitu pro Inul atau pro Rhoma dan "berperang" melalui media massa. Bagi yang tidak menyukai Inul tidak hanya mengecam -- seperti yang dilakukan penyanyi dangdut H. Rhoma Irama yang membentak Inul dengan mengatakan, "Tahu nggak kamu, kemarin di tivi ada seseorang yang memperkosa anak karena ia baru saja melihat VCD-mu!" (Sari, 2012) -- tetapi juga berdampak pada pembatalan pentas (Tempo, April 2003). Bagi yang pro Inul seperti presiden RI saat itu, (alm) Gus Dur mengatakan "Rhoma tidak berhak melarang dia" (Tempo, Mei 2003a) dan akan mengerahkan Banser NU "jika ada pihak-pihak yang sengaja memasung kreativitas Inul dalam berkesenian" (Tempo, Mei 2003b). Heryanto (2009) bahkan mengatakan debut goyang Inul menjadi kepanikan moral terbesar pada 2003, yang kemudian dis usul munculnya majalah Playboy Indonesia. Kasus Inul dan Rhoma Irama akhirnya bukan semata persaingan dangdut tetapi juga menjadi politis (van Wichelen, 2016) karena antara lain melibatkan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kasus Inul juga diyakini turut mendorong lahirnya UU No. 44/ 2008 tentang Pornografi (Allen, 2007; Heryanto, 2009; Bellows, 2011).

Kasus ketiga adalah kepanikan moral "LGBT" yang merebak sejak 2016 yang membuat media bersifat homofobik melalui ujaran kebencian terhadap kelompok ragam gender dan seksual non-normatif. Istilah "LGBT" yang dipopulerkan terutama oleh media daring menuai ujaran kebencian yang dikemukakan para pejabat publik seperti menteri, anggota parlemen DPR/MPR, politikus, kemudian meluas pada pernyataan berbagai komisi negara dan kepala daerah (Davies, 2016, Heinrich Böll Stiftung, 2016, Suryakusuma, 2016). Kelompok "LGBT" selain dianggap menyimpang dari moral agama dan tidak sesuai dengan Pancasila, juga dianggap sebagai ancaman serius seperti terungkap melalui pernyataan Menteri Ryamizard Ryacudu bahwa LGBT lebih berbahaya dari ancaman nuklir dan merupakan *psy war* (Laporan LBHM, 2017).

Kepanikan moral "LGBT" ini tidak hanya semata meluapkan amarah, ujaran kebencian, diskriminasi dan stigma melalui media, melainkan juga memunculkan diskursus "normalisasi "LGBT" serta berbagai persekusi terutama terhadap gay dan waria pada 2017 dan memunculkan usulan pemidanaan "LGBT". Saat ini sudah ada Perda No 10/2018 di Pariaman Sumatera Barat yang melarang tindakan asusila antara pasangan denganseks yang sama (Wijaya, 2022) dan Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (ICJR, 2022).

Suatu kondisi dimana terjadi semacam histeria massa, pro dan kontra atas nama moral, ada seseorang atau sesuatu yang dianggap mengancam nilai atau moral baik dan kepentingan masyarakat secara luas, menyebabkan panik, cemas atau rasa takut dan merasa ada ancaman yang berdampak nasional hingga membuahkan peraturan atau hukum untuk menanggulangnya disebut sebagai kepanikan moral.

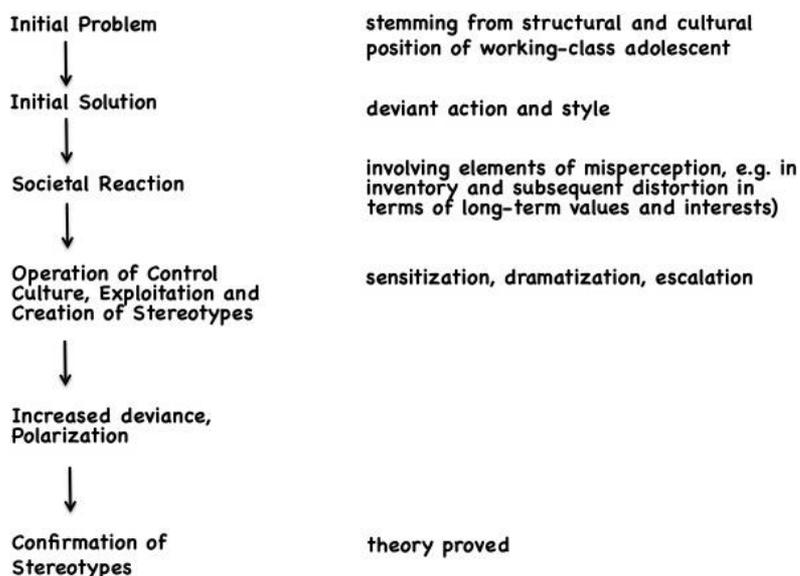
Teori Kepanikan Moral (selanjutnya disebut TKM), seperti yang awalnya diteorikan oleh Cohen (1972; 2011) dalam sosiologi penyimpangan dan kejahatan, adalah ketakutan yang meluas (seringkali tidak rasional) tentang seseorang atau sesuatu yang mengancam nilai, keamanan, dan kepentingan masyarakat. Kepanikan moral biasanya berpusat pada populasi terpinggirkan yang dianggap menyimpang; mereka memperkuat stereotip, membesar-besarkan perbedaan yang dirasakan dan membangun kebutuhan palsu akan kontrol sosial yang lebih besar (Bain dkk, 2018).

TKM pada dasarnya merupakan kajian multidisipliner. Pada awalnya teori ini bertumpu pada konsep-konsep sosiologis, kemudian berkembang pada studi media, studi budaya (*cultural studies*) bahkan kajian kriminologi sehingga cara mengkaji atau menempatkan isunya pun beragam (Critchler, 2017). Studi kepanikan moral pada dasarnya mengkaji sebuah situasi sosial yang berada dalam situasi pro dan kontra yang tinggi terutama berkenaan dengan moralitas, sesuatu yang tidak dapat diterima (*unacceptable*) di masyarakat (Potts dan Scannel, ed., 2013).

Studi-studi awal kepanikan moral tahun 1960-an dan pada dua atau tiga dekade sesudahnya lebih banyak menelaah moralitas yang berkelindan dengan masalah-masalah sosial yang terjadi seputar subkultur anak muda seperti penggunaan obat (*drugs*) ilegal dan konsumsi alkohol, seks dan AIDS, penjangbretan, seks yang dipertunjukkan (*sex on screen*), seksualitas remaja serta kelompok ragam gender dan seksual seperti LGBTIQ

(Thompson, 1998, Goode dan Yehuda, 2009, Cohen 2011, Potts dan Scannel, 2013, Critcher, 2017). Semua permasalahan tersebut dianggap tidak dapat diterima masyarakat atau *unacceptable* meminjam istilah Potts dan Scannel (2013).

Bagan 1 *Moral Panic* oleh Cohen (1972)



Sumber: Cohen (2011)

Studi TKM menjadi penting tidak hanya pada studi-studi sosiologis sebagaimana teori ini dilahirkan, namun juga pada ranah komunikasi massa dan studi-studi lainnya, mengingat proses kepanikan moral di masyarakat terjadi melalui kontribusi media massa. Falkoff (2018) menyatakan bahwa sejak kemunculannya di tahun 1970-an, gagasan dari TKM telah memainkan peran yang kuat dalam berbagai penelitian sosiologi dan komunikasi serta bergeser ke bidang akademis lain seperti diskursus populer dan politik. Para pengkaji teori kepanikan moral awal seperti Cohen (2011), Hall dkk (1982) menyatakan bahwa media cenderung mendukung kepanikan moral seperti memobilisasi persetujuan publik maupun pernyataan yang diberikan oleh politisi atau legislator (Critcher, 2014).

Cohen (2011) dalam Bain dkk (2018) mengidentifikasi empat agen yang sangat penting untuk perkembangan kepanikan moral: (1) media massa. Media memberikan gambaran awal sampai membingkai masalah, memperburuk situasi yang mengancam dengan melampirkan gambar-gambar simbolis dan menyarankan cara-cara untuk mengatasinya; (2) 'pengusaha moral' yang bekerja secara politis untuk memberantas ancaman; (3) figur otoritas institusional yang menegakkan kontrol sosial (misalnya polisi, pengacara, legislator, dan pembuat kebijakan) dan (4) publik yang menafsirkan ancaman dan menuntut tindakan yang ketat.

Secara umum terdapat dua model besar dalam TKM. *Model pertama* adalah model proses (*processual model*) yang diwakili oleh karya Stanley Cohen (1972) dan Stuart Hall dkk (1978). Model ini merupakan tipikal yang berurutan (*sequential model*) yang terdiri dari pertama adalah problem awal; kedua adalah penyelesaian awal; ketiga adalah reaksi masyarakat, yang bekerjanya melalui tahap keempat yaitu kontrol budaya dengan eksploitasi dan menciptakan stereotipe; kelima adalah meningkatkan penyimpangan dan polarisasi; dan keenam adalah konfirmasi stereotipe (Cohen, 2011: 226) Lihat bagan 1.

Cohen (2011) tidak memberikan penjelasan secara rinci pada struktur bagan. Cohen hanya menjelaskan bahwa analisis kasus geng Mods dan Rockers ini dilakukan melalui pendekatan sosiologis maupun psikologi sosial. Oleh karena itu konsep-konsep seperti penyimpangan, kenakalan dan kejahatan banyak berbaran dalam buku ini. Namun pada hakekatnya media massa berperan penting di sepanjang tahapan terjadinya kepanikan moral. Berikut penjelasan model Cohen:

Tabel 1 Tahap Kepanikan Moral Cohen

Tahap	Keterangan	Peran Media
<i>Initial Problem</i>	Disebut juga masalah awal, adalah hal atau peristiwa yang dianggap memicu terjadinya kepanikan moral. Saat meledaknya peristiwa itu, dianggap menyimpang dari tatanan sosial masyarakat dan membahayakan tingkat nasional jangka panjang. Pemicunya adalah geng motor di Inggris, Mods dan Rockers yang dianggap ugal-ugalan, brengsek dan bukan panutan bagi anak muda. Kematian salah satu anggota geng motor memicu terjadinya kepanikan moral di Inggris saat itu.	Media memberitakan kematian anggota geng motor yang memicu munculnya kepanikan moral. Pada kasus <i>Mods</i> dan <i>Rockers</i> . Media memberitakan bahwa masyarakat merasa panik dan cemas.
<i>Initial Solution</i>	Solusi awal, adanya berbagai pendapat dan pikiran berbagai banyak pihak, membuka sebuah diskursus tentang hal yang terjadi. Solusi awal ini diharapkan dapat “mengenalkan” pelanggaran yang terjadi yang dianggap menyimpang dan melanggar norma masyarakat. Kecaman masyarakat pada kasus geng motor diperhatikan dan mendukung tindakan hukum pada “pelanggar” moral masyarakat.	Media seolah menggalang opini untuk “mengisolasi” para “ <i>folk devils</i> ” antara lain melalui penjara dan berbagai sanksi hukuman.
<i>Social Reaction</i>	Adalah reaksi masyarakat dalam kepanikan moral tidak hanya sebagai reaksi berlebihan dalam pengertian kuantitatif, tetapi juga tendensi (condong ke arah ideologi tertentu). Para politisi dan penjual moral (<i>moral entrepreneur</i>) dalam menyikapi kasus geng motor	Media cenderung menampilkan kegelisahan dan ketakutan masyarakat, menganggap bahwa geng motor menjadi ancaman moral jangka panjang
Operation of control culture, exploitation and creation of stereotypes	Operasi mengontrol budaya adalah hal yang dilakukan untuk menegaskan bahwa kepanikan moral yang terjadi berlawanan dengan nilai budaya atau kepentingan masyarakat. Pada tahap ini mengenai bagaimana stigma, kepekaan akan suatu hal dan ekskalasinya dibentuk.	Cara-cara media menciptakan stereotipe dan mengeksploitasinya. Menurut Cohen (2011), komunikasi massa seperti pers memiliki kemampuan untuk membentuk stereotipe melalui simbolisasi kekuatan kata-kata dan gambar.
Increased deviance, polarization	Meningkatnya penyimpangan dan polarisasi, adalah tahapan dimana konsep penyimpangan yang diberikan pada subyek yang dituduh menjadi penyebab kepanikan moral kian meningkat. Akibatnya terbentuk polarisasi dalam masyarakat, membelah masyarakat yang bukan sekedar pro ataupun kontra.	Media berperan besar membentuk polarisasi melalui pembentukan opini
Confirmation of stereotypes	Merupakan proses memastikan stereotipe yang dilekatkan pada subyek yang dituduh menjadi penyebab terjadinya kepanikan moral. Pada tahap ini, subyek dengan jelas ditempatkan sebagai setan masyarakat atau <i>folk devils</i> dan untuk itu wajib dikenai hukuman atau dikriminalkan.	Media mengkonfirmasi dan seolah mengamini <i>folk devils</i> yang menyebabkan terjadinya kepanikan moral

Sementara *model kedua* adalah model atribusional (*attributional model*) yang mendasarkan pemikiran konstruksionis yang berasal dari kritik terhadap model proses. Model konstruksionis mengandalkan para pemikir sosiolog konstruksionis seperti Blumer (1971), Downs (1972), Spector and Kitsuse (1977) serta Peyrot (1984). Mereka memiliki kontribusi terhadap tahap kepanikan moral dengan istilah yang berbeda, seperti tabel berikut (Cricher, 2003):

Tabel 2 Tahapan Model Konstruksionis

	Blumer (1971)	Downs (1972)	Spector and Kitsuse (1977)	Peyrot (1984)
Tahap 1	Kemunculan (<i>Emergence</i>)	Pra persoalan (<i>Pre-problem</i>)	Menegaskan klaim dan dipublikasikan (<i>Claim asserted and publicized</i>)	Mobilisasi agitasi (<i>Mobilizing agitation</i>)
Tahap 2	Legitimasi (<i>Legitimation</i>)	Penemuan dan optimisme (<i>Discovery and optimism</i>)	Respon agen-agen resmi (<i>Official agencies respond</i>)	(formasi kebijakan) (<i>Policy formation</i>)
Tahap 3	Mobilisasi (<i>Mobilization</i>)	Realisasi pembiayaan (<i>Realization of costs</i>)	Pembuat klaim tidak setuju dengan solusi (<i>Claim makers dissent from solutions</i>)	Implementasi kebijakan (<i>Policy implementation</i>)
Tahap 4	Perencanaan formasi terencana (<i>Official plan formation</i>)	Turunnya ketertarikan publik (<i>Decline of public interest</i>)	(pembuat klaim menempatkan alternatif-alternatif. (<i>Claim makers posit alternatives</i>))	Modifikasi program (<i>Programme modification</i>)
Stage 5	Pelaksanaan Perencanaan (Plan implementation)	Paska persoalan (Post-problem)		Mereka ulang agitasi (<i>Reform agitation</i>)

Dari keempat karya mengenai kepanikan moral yang telah dijelaskan sebelumnya, membentuk dikotomi pandangan mengenai teori kepanikan moral yaitu dengan apa yang disebut *British tradition* dan *American Tradition*. Secara keseluruhan tradisi Inggris tertarik pada kepanikan moral karena kepanikan moral memproduksi keluaran kontrol sosial yang berasal dari negara, dipengaruhi oleh elit politik dan media. Media massa dalam kedua tradisi ini memiliki peran yang berbeda. Pada model konstruksionis, media tidak berperan cukup besar dalam membentuk kepanikan moral, tepatnya diremehkan. Spector dan Kitsuse misalnya, menyatakan bahwa hal itu terjadi sebagai masalah sosial yang disebabkan "kegiatan individu atau kelompok yang membuat pernyataan keluhan dan klaim sehubungan dengan beberapa kondisi yang diduga" (Spector dan Kitsuse dalam Best, J., 2013).

Perbandingan kerangka berpikir antara tradisi Inggris dan tradisi Amerika dapat dilihat pada tabel berikut (Cricher, 2003):

Tabel 3 Perbandingan Tradisi Analisa Kepanikan Moral

Isu	Tradisi Inggris	Tradisi Amerika
Kepentingan utama	Keluaran kontrol sosial	Proses konstruksi sosial
Area strategis	Institusi politik/negara	Arena publik
Pemberi definisi kunci	Elit politik/media	Pembuat klaim
Peran media	Mendukung dan memperkuat definisi utama	Sebagai saluran atau kanal bagi pembuat klaim
Bentuk debat publik	Menutup secara ideologis	Klaim untuk membuat retorika

Perbedaan lain yang muncul dari kerangka berpikir dua tradisi ini adalah konsepsi mengenai "Folk Devil" atau "Setan Masyarakat" yang dimunculkan oleh media. Gambaran mengenai "Folk Devil" atau siapa yang "seharusnya disalahkan"

METODE

Tulisan ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, menggunakan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif menggunakan berbagai materi empirik mulai dari studi kasus dan pengalaman personal seseorang hingga teks kultural dan produksi teks yang bermakna dalam kehidupan individu (Denzin dan Lincoln, 2017). Hal ini menurut Denzin dan Lincoln menjadikan dalam penelitian kualitatif sendiri sebagai seperangkat tindakan interpretif, tidak ada praktek metodologi yang tunggal. Dengan demikian peneliti kualitatif juga memiliki “keistimewaan” melakukan beberapa tahapan metode yang diantaranya melibatkan metode kuantitatif seperti statistik, tabel, grafik dan angka (h. 46).

Tabel 4 Daftar buku yang dikaji

Buku Utama	Buku Pendamping
Cohen, S. (2011). <i>Folk Devils and Moral Panics</i> , 3rd ed. London and New York: Routledge	Connell, K. (2015). Policing the Crisis 35 Years On. A review article. <i>Contemporary British History</i> , 2015 Vol. 29, No. 2, 273–283
Hall, S. Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., & Roberts, B. (1982). <i>Policing the Crisis: Mugging, The State and Law and Order</i> . Macmillan International Higher Education.	Giuliani, G., Garraio, J., Santos, S.J. (2020). Online social media and the construction of sexual moral panic around migrants in Europe. <i>Socioscapes. International Journal of Societies, Politics and Cultures</i> vol. 1 Issue 1, pp. X-XX.
Thompson, K (2005). <i>Moral Panics</i> . Taylor and Francis e Library.	Herdt, G. (2009). Introduction: Moral Panics, Sexual Rights, and Cultural Anger dalam Herdt, G. (Editor). <i>Moral panics, sex panics: Fear and the fight over sexual rights</i> . NYU Press.

Studi literatur atau tinjauan pustaka menurut Aveyard (2019) adalah studi komprehensif dan interpretasi literatur yang berhubungan dengan suatu topik tertentu. Ketika melakukan tinjauan pustaka, sebetulnya penulis sedang mengidentifikasi pertanyaan penelitian kemudian berusaha menjawab pertanyaan ini dengan mencari dan menganalisis literatur yang relevan menggunakan pendekatan sistematis. Tinjauan pustaka ini berusaha meringkas literatur yang tersedia yang mengerucut pada satu topik.

Literatur yang akan dibahas pada studi ini mengacu pada kepanikan moral dan kepanikan moral seksual. Kepanikan moral seks atau moral panik seksual adalah salah satu isu sosial dalam situasi kepanikan moral. Dengan demikian literatur-literatur yang dibahas berkaitan dengan dengan kepanikan moral dan kepanikan moral seksual. Beberapa buku yang dibahas dalam studi ini dapat dilihat pada tabel 1.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep “Moral” dalam Teori Kepanikan Moral

Konsep “moral” dalam kepanikan moral bukanlah sebuah hal yang mudah. Untuk itu diperlukan beberapa batasan, namun ketika moralitas digunakan untuk mengukur suatu kelompok atau obyek menyimpang, akan memunculkan dikotomi sederhana antara baik dan buruk (Critcher, 2003, Critcher, 2009; Fahs dan Dudy, 2013). Pada umumnya teori kepanikan moral membahas mengenai pro-kontra tinggi, terutama berkenaan dengan moralitas yaitu persoalan di masyarakat yang dianggap “salah” atau “menyimpang”. Dengan kata lain melihat secara dikotomis hal-hal yang dianggap “salah”, “buruk” atau “menyimpang” dengan hal “baik”, “benar” atau “lurus”.

Critcher (2003) memindai tiga cara untuk “menguji” munculnya kepanikan moral yaitu *satu*, memfokuskan terjadinya penyimpangan sebagai suatu kondisi atau aktivitas yang melekat pada suatu kelompok; *dua*, di dalam aktivitas itu ada ancaman pada tatanan moral secara menyeluruh dan bukan sekedar masalah yang berada di tingkat lokal; *tiga*, ancaman menyangkut dua istilah mendasar yang dipercayai oleh masyarakat yaitu baik dan buruk. Ketiga hal ini memperjelas asumsi peristiwa geng motor yang dianalisis oleh Cohen (1972) dan penjabretan oleh geng anak muda berkulit hitam oleh Hall dkk (1978) sebagai *folk devils* di masyarakat Inggris pada 1960-1970an.

Pengertian moral dalam kepanikan moral adalah konsep yang dianggap “netral” daripada yang lain dalam arti mudah untuk dikaitkan dengan berbagai masalah dan pendekatan ilmu sosial lain, --tidak hanya sosiologis sebagaimana kemunculan awal TKM-- diantaranya seksualitas dan media dan tentu saja relasi kuasa. Konsep moral sendiri dianggap hal yang paling mudah dan “netral” diterima oleh masyarakat dan bisa dikaitkan dengan berbagai masalah dengan berbagai pendekatan yang berpusat misalnya dengan agama, kelas, status dan lainnya yang dianggap “sensitif” di masyarakat seperti membahas “seks” (Rohloff dkk, 2013).

Konstruksi moralitas dalam kepanikan moral seksual memiliki prioritas utama terpenting keti kamemahami penciptaan dan penyebaran kepanikan moral seksualitas. Dalam hal ini kelompok yang memutuskan seksualitas seperti apa yang dianggap “warga seksual yang baik” atau “warga seksual yang buruk” atau tubuh maupun praktik seksual yang “baik” atau “buruk”, siapa saja yang dianggap hina, dicurigai dan menjijikkan ternyata memiliki kekuatan resmi dan selalu bersanding dengan konsep kekuasaan (Fahs dkk, 2013).

Menjejak Teori Awal Kepanikan Moral dan Peran Media

Istilah kepanikan moral yang berawal dari studi sosiologi dari Jock Young, seorang sosiolog asal Inggris (1971) mengenai penggunaan obat di kalangan anak muda (Critcher, 2017). Istilah tersebut dipopulerkan oleh Stanley Cohen (1972) melalui studinya tentang “kebrutalan” geng motor anak muda di Inggris yang diterbitkan menjadi buku berjudul *Folk Devils and Moral Panics*. Cohen dalam bukunya mendefinisikan moral panik sebagai sebuah peristiwa menempatkan masyarakat berada dalam sebuah situasi sosial yang menyebabkan rasa takut dan cemas dan membuat mereka merasa terancam. Ancaman biasanya disajikan oleh media dengan memberikan pandangan atau stereotipe tertentu pada berita (*news*) melalui orang-orang yang biasa “berurusan dengan moralitas”.

Dalam bukunya, Cohen menarasikan peristiwa geng motor anak muda di Inggris (*Mod* dan *Rocker*) pada awal 1960an sebuah masalah sosial yang menjadikan kedua geng motor dinyatakan sebagai *folk devils* (setan masyarakat). Model dari kepanikan moral versi Cohen sendiri adalah prosesual atau sekuensial melalui tahapan-tahapan atau perkembangan atau pergerakan peristiwa terjadinya kepanikan moral secara sosiologis. Model prosesual ini menjadi model awal dalam studi-studi kepanikan moral.

Kajian kepanikan moral berikutnya dengan subyek yang berbeda yaitu tentang penjabretan (*mugging*) melalui tulisan Stuart Hall, Chas Critcher, Tony Jefferson, John Clarke dan Brian Roberts dalam bukunya *Policing the Crisis* (1978). Buku ini merupakan kumpulan tulisan selama periode enam tahun setelah penangkapan tiga pemuda yang memiliki latar belakang etnis campuran pada tahun 1972 untuk kasus penjabretan di distrik Handsworth, Birmingham. Kasus penjabretan itu pada akhirnya tidak menjadi sekedar kasus kriminal, melainkan menjadi hegemonik untuk perasaan tidak aman atau khawatir atas beberapa etnis imigran yang melakukan kejahatan.

Kasus-kasus penjabretan yang dilakukan anak muda di Inggris menurut Hall dkk menjadi signifikan karena menghubungkan sejumlah analisis seperti teori negara, ras dan etnisitas (identitas pelaku *mugging* yaitu anak muda kulit hitam Inggris), sejarah politik pasca perang dan studi media (Critcher, 2003). Dengan mengikuti pola pikir Antonio Gramsci, para penulis buku ini mendefinisikan periode ini sebagai salah satu 'krisis hegemoni' pasca perang yang dipengaruhi masuknya gelombang imigran pemuda berkulit hitam yang dianggap permisif secara seksual dan berperilaku tak terkendalikan. Dalam konteks ini, para penulis berpendapat bahwa citra 'penjabret' dibangun oleh kekuatan gabungan antara media, opini publik konservatif dan negara. Nama terakhir menjadi sarana untuk membenarkan jalannya dengan cara yang semakin represif untuk “memenangkan persetujuan” (Connell, K., 2015).

Kepanikan moral sangat berhubungan dengan peran media karena memperhitungkan keterkaitan isu yang menjadi sumber kepanikan moral dengan liputan berita mengenai topik-topik tertentu (yang biasanya berangkat dari penilaian terhadap dikotomi moral baik atau buruk) dan kontrol sosial diberlakukan melalui media. Media menurut Cohen (2011) adalah salah satu dari empat agen (media massa, pengusaha moral, kontrol budaya dan publik) yang dianggap penting dalam mengembangkan kepanikan moral terutama ketika menciptakan kepanikan moral dan *folk devils* serta saat melakukan proses membesarkan penyimpangan (Cohen, 2011). Hanya saja Cohen masih memisahkan antara peran media dengan peran lembaga kontrol lainnya seperti politisi dan penjaga moral (*moral entrepreneur*) seperti yang dijelaskannya melalui empat agen penting dalam terjadinya kepanikan moral. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi sosiologi dalam teori kepanikan moral masih dianggap dominan dan cenderung memberikan porsi kecil bagi peran media (Thompson, 1998). Padahal dalam kenyataannya kajian sosiologi media seharusnya menjadi sentral dalam melihat kepanikan moral.

Media massa pada proses kepanikan moral menurut Cohen (2011) pada dasarnya menyukai memuat hal-hal yang “menyimpang” dan cenderung “tipikal” dan diolah untuk lebih “menjual” seperti menjadikannya sebagai informasi yang telah diolah dan mendefinisikannya sesuai dengan mode produksi dimana industri media

berada. Pertanyaan-pertanyaan seperti “apakah yang menyebabkan penyimpangan?”, “apakah karena penyakit atau penyimpangan yang disengaja?”, “apakah dia adalah anak laki-laki yang tidak berdosa yang disesatkan, atautkah dia adalah penjahat yang psikopat?” Pernyataan Cohen ini menunjukkan bahwa realitas sosial menjadi realitas media yang dikonstruksi melalui proses produksi dan memiliki definisinya sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibentuk oleh media.

Di tangan media, isu minoritas gender dan seksual misalnya, telah diolah menjadi semacam hal yang mengerikan, menakutkan, penuh dosa dan menjadi ancaman serius bagi kehidupan bangsa dan negara. adalah konsep yang umum diolah dan sudah didefinisikan oleh media. Sementara menurut Young (2011), media dipandang memainkan peran kunci dalam kepanikan moral pada tiga hal yaitu *pertama* dengan cepat menyebarkan citra penyimpangan stereotip; *Kedua* media mampu menciptakan tingginya pemberitahuan yang meluas (*spirals of alarm*); *Ketiga* dalam mendorong proses amplifikasi penyimpangan dimana penyimpangan kelompok atau individu terus-menerus naik ke atas sehingga menimbulkan, dalam beberapa kasus, menjadi ramalan yang dipenuhi sendiri. Hal ini tentu saja menurut Young diciptakan melalui ledakan media yang tak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Erich Goode dan Nachman Ben-Yahuda (2009) dalam buku mereka *Moral Panics: The Social Construction of Deviance* menegaskan besarnya kontribusi media dalam mewujudkan terjadinya kepanikan moral antara lain dengan menyebut sebagai kobaran api media.

Media setidaknya melakukan tiga sampai lima proses pada tahapan kepanikan moral yang akhirnya memancing kepanikan di masyarakat. Media juga menetapkan orang atau kelompok yang dianggap menyimpang sebagai setan masyarakat (*folk devils*). Semua hal ini terjadi dalam proses rutinitas normal produksi media. Critcher (2008) melihat bahwa penyebabnya bukan konspirasi di antara jurnalis tetapi terjadi di dalam praktik pembuatan berita yang biasa. Media paling banyak memperhatikan peristiwa-peristiwa itu dan orang-orang yang mengganggu tatanan sosial. Untuk menafsirkan peristiwa semacam itu, mereka menggunakan “struktur inferensial”, penjelasan implisit tentang seperti apa perilaku itu, siapa yang melanggarnya dan mengapa itu terjadi.

Media dengan demikian berperan penting dalam TKM, yaitu melakukan kontrol pada masyarakat dengan membangun narasi ketakutan. Bentuknya adalah dengan mempromosikan kekacauan dan keyakinan adanya “hal-hal di luar kendali”. Ketakutan, kejahatan, dan viktimisasi, dialami oleh masyarakat melalui media massa. Diskursus ketakutan telah dibangun melalui berita dan berbagai bentuk budaya populer. Kehidupan sosial menjadi lebih bertentangan ketika aktor sosial mendefinisikan situasi yang terjadi sebagai 'menakutkan' dan melibatkan diri berbicara melalui diskursus ketakutan (Altheide, 2009). Hanya saja studi mengenai peran media dalam TKM ini tidak banyak disajikan di TKM versi Stanley Cohen (1972) maupun versi Goode dan Ben-Yehuda (2009). Hal ini antara lain karena Cohen meletakkan posisi media berbeda dengan posisi politikus dan pengusaha moral (*moral entrepreneurs*). Padahal pernyataan mereka tentang situasi kepanikan moral akan diketahui publik hanya melalui media. Sedangkan arti penting media dalam TKM dibahas dengan lebih serius pada versi Hall dkk (1982). Pada TKM versi Hall dkk, peran media dibahas tersendiri dalam sebuah bab yang menunjukkan cara media melakukan produksi dan berproses dalam kepanikan moral pada kasus penjangbrengan di Inggris.

Kepanikan Moral Seksual, Media dan Representasi Isu Seksualitas

Salah satu isu yang menjadi penyebab terjadinya kepanikan moral adalah seksualitas profan yang terdapat di masyarakat. Seksualitas profan adalah seksualitas yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kontroversi mengenai seksualitas profan ini bersinggungan dengan ketubuhan perempuan atau moralitas ketubuhan manusia, termasuk orientasi seksual atau ekspresi gender seseorang. Media massa berfungsi penting terutama dalam memberitakan kelompok-kelompok minoritas, dimana secara historis kelompok-kelompok tersebut kerap dimarginalkan, dan media memiliki peran penting di dalam proses tersebut terutama menurut de Jong adalah ketika media melakukan konstruksi dari “realitas sosial” (de Jong, 2006, p. 38). Ketika seksualitas profan tersebut dianggap tidak sesuai aturan, tatanan, norma sosial dan dianggap “menyimpang” atau “salah” di masyarakat, besar kemungkinan menyebabkan terjadinya moral panik seksual.

Merujuk Fahs dkk. (2013), kepanikan moral seksual sesungguhnya adalah keriuhan atau hiruk pikuk kolektif dari sekelompok orang yang mendefinisikan diri sendiri sebagai "moralis" dan menyesuaikan pada pengajaran agama yang normatif serta melakukan banyak peminggiran. Dalam proses kepanikan moral seksual menurut Fahs dkk cenderung mendorong terjadinya marginalisasi, penindasan dan bahkan pengusiran dengan kekerasan semua bentuk seksualitas yang tidak dianggap "normal", di mana normal didefinisikan oleh mayoritas praktisi (atau mereka yang mengaku diri sebagai pakar) dan berjalan di bawah kedok diskursus moral.

Dalam proses kepanikan moral, media umumnya menunjukkan sejumlah klaim dalam menyorot suatu isu. Isu harus tampak seperti kisah novel dan dramatik, menjadi tepat atau menguntungkan dan juga menonjol (Critcher, 2003). Dari pernyataan Critcher dapat dilihat bahwa media “tertarik” dengan peristiwa yang dianggap “mengganggu” tatanan sosial. Sehubungan dengan isu seksualitas di media, dapat dikaitkan dengan pernyataan

seorang antropolog feminis, Gayle Rubin (1984) dalam *Thinking Sex*, bahwa masyarakat sangat tergilagila dengan seksualitas bahkan menjadi semacam sarana untuk menghilangkan kecemasan sosial atau membantu melepaskan intensitas emosional. Hal ini tampak dari bagaimana media massa secara global sejak 1970-an menempatkan isu seksualitas menjadi bagian dari budaya populer sebagaimana halnya fashion, kecantikan dan narasi percintaan (Machin dan Leeuwen, 2007).

Namun, Rubin juga mengatakan bahwa seks pun tidak dapat dilepaskan dari narasi politik. Ketika ranah seksualitas dijiwai dengan konflik kepentingan dan manuver politik, baik disengaja ataupun tidak, akan terjadi ketidakadilan dan moda penindasan. Artinya, seks akan selalu menjadi politis (Rubin, 2007: 150). Dari pernyataan baik Rubin maupun Critcher dapat dikatakan bahwa "seksualitas" dalam hal ini kepanikan moral seksualitas diciptakan sebagai sebuah fakta sosial, sebagai dunia tempat beroperasinya kekuasaan melalui kontrol sosial, yaitu melalui media massa.

Kepanikan moral terutama mengenai seksualitas memang pada dasarnya mengkristalisasi ketakutan dan kecemasan dan secara berulang dengan mengkambinghitamkan kelompok tertentu yang teridentifikasi sebagai 'tidak bermoral' atau "kemerosotan moral" dan disebut sebagai *'folk devils'* (Weeks, 2014). Bagi Weeks, seksualitas memiliki sentralitas yang khas dalam kepanikan seperti itu dan hal yang secara seksual dianggap tidak lumrah akan menjadi kambing hitam yang berulang-ulang.

Secara konvensional, masalah moral yang terkait dengan konsep "penyimpangan" dalam ranah seksualitas, menurut Bancroft (2009) adalah perilaku yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Pada umumnya berupa gabungan antara norma atau hukum yang dilembagakan dan norma-norma atau adat istiadat yang diinternalisasi. Bancroft mengutip Gagnon & Simon (1967) membedakan antara tiga jenis penyimpangan seksual yaitu *satu*, penyimpangan normal, yang meliputi perilaku seperti masturbasi, hubungan seksual di masa pra-nikah dan seks oral, yang, meskipun dikedam dan bahkan di beberapa bagian dunia masih dilarang secara hukum, namun dilakukan oleh banyak orang; dua, penyimpangan subkultur, yang mencakup minoritas seksual yang lebih jelas, seperti subkultur homoseksual dan transgender; tiga, penyimpangan individual, yang mencakup perilaku seksual yang tidak diatur secara jelas ke dalam subkultur atau kelompok minoritas.

Merujuk pada penyimpangan seksual yang dikemukakan Bancroft maka dapat dipahami apabila relasi yang dianggap terbaik adalah heteroseksual. Ada asumsi tak terucapkan bahwa ruang keseharian (yang normal) yang diterima atau dirasakan, ditempati dan direpresentasikan adalah heteroseksual. Dengan demikian maka homoseksual dianggap berada di luar ruang yang normal atau wajar, atau dengan kata lain menurut Hubbard, homoseksualitas dianggap lain (*other*) dibandingkan heteroseksual yang direpresentasikan sebagai normal, sehat dan memuaskan (Hubbard, 2008).

Gayle Rubin (1993) memberikan semacam "syarat" tentang kaidah seksualitas yang dianggap "baik" dan "buruk" dalam mitos masyarakat Barat. Menurut Rubin, seksualitas yang dianggap "baik", "normal" dan "alami" idealnya adalah heteroseksual, monogami, bertujuan reproduksi, dan tidak komersial; harus dari satu generasi yang sama, berpasangan, berelasi satu sama lain, dan dilakukan di dalam rumah; tidak melibatkan pornografi, obyek fetish, alat bantu seks apapun. Seks apapun yang melanggar peraturan ini dianggap "buruk", "abnormal" dan "tidak alami". Seks yang "buruk" meliputi homoseksual, di luar perkawinan, tidak prokreatif atau komersial. Ia dapat berupa onani, berlangsung di rumah bordil, antar generasi yang beda jauh, berlangsung di tempat "publik", di semak-semak atau di bak mandi. Praktik seks yang seperti itu biasanya menggunakan pornografi, obyek fetish atau pembagian peran yang tidak semestinya.

Penjelasan Rubin (1993) mengenai mitos 'baik' dan 'buruk' dalam masyarakat Barat itu ternyata dianut oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Maka tidaklah mengherankan apabila homoseksual selalu dianggap oleh masyarakat yang mayoritas heteroseksual ini sebagai "sakit", "gangguan jiwa" dan "tidak normal" atau "penyimpangan". Di sisi lain heteroseksual seolah menjadi kebenaran yang "*taken for granted*". Ada asumsi tak terucapkan bahwa ruang keseharian (yang normal) yang diterima atau dirasakan, ditempati dan direpresentasikan adalah heteroseksual. Dengan demikian maka homoseksual dianggap berada di luar ruang yang normal atau wajar, atau menurut Hubbard (2008), homoseksualitas dianggap lain (*other*) dibandingkan heteroseksual yang direpresentasikan sebagai normal, sehat dan memuaskan. Dominasi heteroseksual ini diturunkan atau diwariskan pada masyarakat melalui nilai-nilai yang disebut sebagai nilai heteronormatif. Nilai ini menyebar ke semua institusi sosial di masyarakat termasuk media.

Konstruksi moralitas dalam kepanikan moral seksual memiliki prioritas utama terpenting ketika memahami penciptaan dan penyebaran kepanikan moral seksualitas. Dalam hal ini kelompok yang memutuskan seksualitas seperti apa yang dianggap "warga seksual yang baik" atau "warga seksual yang buruk" atau tubuh maupun praktik seksual yang "baik" atau "buruk", siapa saja yang dianggap hina, dicurigai dan menjijikkan ternyata memiliki kekuatan resmi dan selalu bersanding dengan konsep kekuasaan (Fahs dkk, 2013).

Mengkaji Ulang Teori Kepanikan Moral dalam Isu Seksualitas di Era Digital

Teori kepanikan moral versi Cohen (1972/2011) meski sudah banyak digunakan untuk mengkaji masalah sosial yang berhubungan dengan “penyimpangan sosial” dan “tindakan-tindakan amoral” yang banyak beredar di kalangan kaum muda (Cohen, 2011, Thompson, 2005) memiliki beberapa kelemahan antara lain tidak melihat proses di tingkat organisasi media. Media menurut Cohen memang berkuasa menentukan berita apa yang akan diproduksi, dan bagaimana seharusnya diakumulasi dan ditampilkan. Media juga menjadi semacam barikade moral yang isinya ditentukan antara lain oleh editor, politisi atau para pengusaha moral seperti kelompok agama sayap kanan (h.1). Dengan kata lain menurut Cohen, media memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dan membentuk permasalahan sosial, yang berarti media juga memiliki kemampuan untuk menjadi agen moral dengan memberikan ‘fakta’ tertentu yang cukup untuk menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, kemarahan atau kepanikan. Faktanya, Munculnya hal-hal itu bertepatan dengan persepsi bahwa nilai-nilai tertentu perlu dilindungi, adanya prasyarat untuk pembuatan aturan baru atau mendefinisikan sebuah masalah sosial (h.9-11).

Kepanikan moral dalam versi Cohen seolah menjadikan masyarakat dalam situasi panik yang luar biasa. Masyarakat seolah “patuh” pada ketakutan tanpa adanya sebuah perlawanan dengan subyek yang disebut sebagai *folk devils* yang dianggap mengacaukan tatanan sosial. Kritik terhadap teori kepanikan moral versi Cohen ini diberikan beberapa akademisi antara lain Stuart Hall, Chas Critcher, Tony Jefferson, John Clarke melalui buku *Policing the Crisis*. Stuart Hall dkk (Hall, dkk., 1982) menyatakan bahwa meskipun media dianggap mendefinisikan permasalahan sosial, namun persoalannya tidak semudah itu. Ada hal yang kompleks ketika media menampilkan sebuah pemberitaan karena media sendiri sesungguhnya berada pada posisi subordinat dan memiliki peran sekunder dibandingkan kekuatan lain di atasnya. Peran hubungan kelas dalam relasi negara, hukum dan hubungan produksi kapitalisme menjadi beberapa faktor penentu ketika jurnalis menuliskan atau membingkai sebuah berita; karena bagaimanapun jurnalis adalah subyek ekonomi dan juga berada dalam pertarungan diskursus legalitas, sehingga reproduksi ideologi kelas yang berkuasa dan pengaruh kekuasaan struktural menjadi tidak terelakkan.

Sementara itu Angela McRobbie (1994) dalam sub-bab berjudul *The Moral Panic in the Age of the Postmodern Mass Media* menyatakan, dalam era posmodernisme, hubungan yang terjadi dalam proses terbentuknya kepanikan moral versi lama seperti para sosiolog atas nama orang yang menyimpang; badan-badan kontrol sosial; media; para penjaga moral dan ahli telah digantikan oleh serangkaian lembaga, badan-badan dan praktik yang lebih beragam dan lebih cair yang terkadang saling terkait. Skenario yang sangat kompleks menurut McRobbie adalah aturan dasar yang makin diterapkan melalui praktik-praktik media massa melalui berbagai narasi yang menyebar di berbagai berita dan peristiwa media yang dilakukan secara masif di berbagai lini (hlm. 205). Kritik McRobbie ini menunjukkan adanya permainan kekuasaan yang kompleks dalam terjadinya kepanikan moral. Memperhatikan perkembangan yang sangat besar dari kepanikan moral di media massa, McRobbie menyatakan bahwa kepanikan moral bahkan mungkin telah menjadi “norma praktik jurnalistik dimana peristiwa sehari-hari dibawa untuk menjadi perhatian publik” (h. 202).

Kenneth Thompson dalam bukunya *“Moral Panics”* (1998) mengatakan bahwa kepanikan moral versi Cohen tidak banyak mengakomodasi kepanikan moral dengan isu seksualitas dan hanya terbatas pada isu sosial di Inggris tahun 1960-1970an. Fakta menunjukkan adanya perubahan isu di Inggris pada 1980an. Jenkins (1992), menyatakan bahwa penekanan isu bergeser pada isu-isu kelompok dan sosial politik di luar masalah kelas atau konflik industrial, yaitu masalah moralitas publik yang berhubungan dengan isu-isu seksualitas. Pada isu-isu tersebut, perdebatan akan dikondisikan oleh kepanikan moral, oleh stereotipe kekerasan seksual dan predator seksual yang mengancam.

Peran Media dalam Studi-Studi Kepanikan Moral Seksual: Kritik Terhadap Model Awal TKM

Kepanikan moral seksualitas dengan isu-isu anak muda atau remaja seperti pornografi, keperawanan, atau kelompok dengan ragam gender dan seksual non-normatif (LGBTIQ) banyak beririsan dengan konteks-konteks seperti agama, hukum dan politik. Media massa berperan penting dalam kepanikan moral ini mulai dari mencuatkan sebuah isu, melakukan polarisasi, memberikan stigma hingga solusi. Media juga berpotensi melakukan *backlash* melalui ujaran kebencian yang diberikan oleh para pakar, pemuka agama, akademisi, politikus hingga Presiden (Vincent, 2009, Pullen, 2012, Tettey 2016, Listiorini, 2019a, Listiorini, 2019b, Listiorini, 2020).

Beberapa isu seksualitas menurut beberapa studi yang dianggap mampu memicu terjadinya kepanikan moral antara lain kasus kekerasan seksual pada anak (Chimonas, 2000), pornografi (Allen, 2007, Bellows, 2011), kekerasan seksual (Giuliani dkk, 2020) dan homoseksual atau “LGBT” (Listiorini, 2019a, Wijaya, 2020; Listiorini 2020). Studi Susan Christine Chimonas (2000) yang berlatar belakang kepanikan moral di Amerika mengenai terjadinya kekejaman di tempat-tempat penitipan anak pada tahun 1980-an. Chimonas menggunakan kasus-

kasus kekerasan dan pelecehan anak-anak di tempat penitipan anak (day care) di tahun 1980-an untuk menguji kasus kepanikan moral. Data utama dalam riset Chimonas adalah artikel berita dan editorial mengenai kasus penitipan anak di majalah cetak dan surat kabar harian serta jurnal psikologi yang membahas kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kepanikan moral tidak bisa dikaji dari aspek sosiologis saja, meskipun dalam pengembangannya juga dikaji secara material seperti yang dilakukan oleh Stuart Hall dkk (2002).

Studi Steven M. Gorelick (1995) yang berjudul *Child, Sexual Abuse, Moral Panic and the Media: A Case Study in the Social Construction of Deviance*. Disertasi ini mengenai kepanikan moral pada kasus pelecehan seksual anak-anak di Mountain Valley, 1984-1988 di Amerika Serikat. Gorelick mencoba menjelaskan bahwa dalam teori kepanikan moral kurang mempertimbangkan proses produksi media dan peran jurnalis. Gorelick mempertanyakan kinerja jurnalis dan faktor-faktor yang mempengaruhi sudut pandang jurnalis dalam menulis berita seperti birokrasi rutinitas media yang mungkin berimplikasi dalam mengkonstruksi berita. Faktor lain adalah pengaruh sisi komersial pada saat berita tersebut diturunkan (Gorelick, 1995: 16-18). Penelitian ini juga menyimpulkan (h. 256-275) bahwa media bertanggung jawab dalam proses pembentukan kepanikan moral terutama di tahap *backlash*. Studi Gorelick ini merupakan sanggahan terhadap TKM Stanley Cohen apabila diterapkan dalam penelitian media massa terutama pada pemberitaan mengenai isu-isu seksualitas.

Studi yang dilakukan Giuliani, Garraio dan Santos (2020) mengenai peran media sosial pada krisis kepanikan moral seksual yang menerpa para imigran dan pengungsi di Eropa mengelaborasi peran media sosial dalam merepresentasikan para perempuan imigran korban pembunuhan setelah diperkosa (*murder-rape*). Riset menempatkan arti penting relasi kuasa yang dilakukan pihak media sosial dan tokoh parlemen di Eropa dan intersubektivitas budaya, ras dari dua belah pihak (media sosial dan penguasa setempat serta para migran). Pada kepanikan moral seksual di Eropa yang dialami para imigran menunjukkan bahwa situasi yang terjadi juga berakar dari sudut pandang rasisme (etnisitas) yang masih dijunjung tinggi masyarakat Eropa yang muncul melalui media sosial. Studi ini juga memaparkan perlunya melakukan interseksional pada kasus kepanikan moral seksual imigran dan pengungsi. Meskipun karya Hall dkk (1982) menjelaskan cara produksi media

Dua kajian mengenai kepanikan moral homoseksualitas yang berlokasi di Indonesia dilakukan melalui riset akademik. Kajian pertama adalah studi Bram Hendrawan berjudul *The Spectacle of 'Deviant' Sexuality: Moral Panics, Tabloid Television and the Birth of the Post-New Order Indonesian Nation*. Studi ini mengkaji tentang pemberitaan terkait seksualitas yang dianggap menyimpang di berbagai program tabloid televisi seperti program kriminalitas dan beberapa program *infotainment* pada tahun 2003-2008. Riset Hendrawan membangun kembali teori kepanikan moral yang berawal dari pemikiran Stanley Cohen (1972) dan dikembangkan dengan beberapa perspektif TKM lain seperti yang dikembangkan oleh Kenneth Thompson (1998) dan Stuart Hall dkk (1978) serta teori diskursus Michel Foucault. Teori Foucault menjadi bagian yang menjelaskan bagaimana kepanikan moral seksualitas sesungguhnya dikaitkan dengan kontrol atau disiplin tubuh.

Kajian kedua oleh Dina Listiorini (2020) melalui studi berjudul *Rezim Kebenaran Media dalam Kepanikan Moral (Diskursus Foucauldian "LGBT" dalam Gelar Wicara Televisi dan Berita Daring 2016-2018)*. Riset Listiorini membuktikan bahwa dalam proses kepanikan moral "LGBT", kuasa tidak semata berasal dari proses produksi jurnalistik dan para pekerja media seperti jurnalis, editor atau redaksi. Dengan menggunakan konsep kuasa *polymorphous of power* dari Michel Foucault (1978), Listiorini menemukan bahwa kuasa jurnalis selain terbentuk dari pengalaman internal jurnalis dan pengetahuannya mengenai "LGBT" dan juga berasal dari para narasumber (terutama yang memiliki keragaman gender dan seksual non-normatif) yang menolak memberikan informasi yang dibutuhkan jurnalis. Kuasa lain adalah "ketundukan" jurnalis pada traffic, algoritma google dan click bait. Semua kuasa itu tak terelakkan dalam industri berita di media daring dewasa ini.

Konsep Kuasa Media yang Lebih Dinamis: Foucault Turn

Beralihnya isu-isu masyarakat modern pada isu mengenai seksualitas manusia menurut Thompson memerlukan pendekatan yang berbeda, salah satunya melalui pendekatan Foucauldian. Pendekatan Foucault untuk studi media yang mengkaji seksualitas misalnya, berbeda dari sosiologi klasik dan teori Marxis mengenai ideologi yang tidak lagi mempertanyakan mengenai kebenaran dan kekuatan represif, melainkan pada bagaimana formasi diskursif membentuk rezim kebenaran yang beredar secara produktif di semua tingkatan. Dengan demikian menurut Thompson, kontribusi kuasa-pengetahuan dari Foucault pada teori kepanikan moral antara lain untuk melihat kontroversi berbagai aspek seksualitas sebagai tanda perebutan, persaingan diskursus dan praktik regulasi dalam sejarah rezim kebenaran yang memiliki kesejarahannya masing-masing dan tidak bisa dibandingkan begitu saja. Digunakannya pendekatan Foucault pada studi-studi kepanikan moral seksualitas pada studi-studi Gorelick (1995), Chimonas (2000), Hendrawan (2008) dan Listiorini (Listiorini, 2020) menunjukkan adanya pergeseran konsep kekuasaan yang melibatkan peran media dalam proses tersebut.

Elemen-elemen kuasa dalam proses pada TKM baik versi Cohen (1972) maupun Hall dkk (1978) juga mengalami pergeseran terutama dalam peran media massa. Meskipun baik Cohen maupun Hall dkk melihat peran media sangat berarti dalam sebuah kepanikan moral, namun model awal TKM hanya melihat peran media dalam meluaskan stigma dalam upaya mengontrol budaya dominan. Model awal lebih bersifat statis, linear *top down* yang menganggap bahwa Model awal tidak banyak melihat proses produksi, peran dan posisi jurnalis dan pengetahuan jurnalis serta kuasa-kuasa lain yang mungkin berpengaruh terhadap peran media dalam situasi kepanikan moral, khususnya kepanikan moral seksual seperti temuan pada studi Gorelick (1995) dan Listiorini (2020).

Teknologi Komunikasi Massa Digital: Kuasa Baru yang Menciptakan Kepanikan Moral Seksual

Media daring sebagai perkembangan dari teknologi media massa yang bersifat digital memungkinkan cepatnya informasi mengalir melewati ruang dan waktu. Salah satu produk media daring adalah berita daring yang mengandalkan prinsip kecepatan. Seringkali, berita daring disebut dengan jurnalisme empat paragraf karena dalam satu berita isinya hanya terdiri dari empat paragraf (Margianto dan Syaefullah, 2012). Berita dibuat sepotong-sepotong dan dihubungkan dengan tautan menuju berita lanjutan atau tautan menuju halaman selanjutnya.

Pemberitaan mengenai seksualitas di era digital tidak lagi bertumpu semata pada “kuasa jurnalis” atau “kuasa narasumber”, namun juga pada mekanisme internet yang mempengaruhi jurnalisme seperti *traffic*, *clickbait* dan *algoritma google*. Tumbuhnya media sosial juga menentukan meluasnya kepanikan moral mengingat para “pengusaha moral” pada saat ini juga memiliki media sosial baik secara organisasi maupun personal. Seorang pemuka agama atau organisasi agama misalnya, bisa jadi memiliki lebih dari satu media sosial yang membantu mereka untuk menentukan hal-hal apa yang dianggap “salah” atau benar”. Pada era media sosial menjadi penting, tidak jarang portal berita mengambil bahan postingan di sosial media.

Platform digital menurut James Walsh, Asisten Profesor Kriminologi di Institut Teknologi Universitas Ontario, yang dikutip Smith (2022) mengatakan “platform digital (misalnya, Facebook, Twitter, Instagram, dan Mumsnet) dan komunikasi merupakan target, fasilitator, dan instrumen produksi kepanikan yang signifikan.” Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran massifikasi peran media karena menurut Smith (2022), kemajuan dalam platform digital telah menciptakan apa yang disebut sebagai “gelembung penyaring”, yang mempersempit cakrawala informasi dan meningkatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan konten yang menarik. Dalam media internet saat ini menurut Herdt (2009), kepanikan seks memiliki nilai hiburan dan modal *voyeur* atau rasa ingin tahu yang menjual (misalnya, *clickbait*, cerita sensasional) atau memasarkan produk seperti artikel berita, barang-barang populer (*kitsch*). Artinya, ketika portal-portal daring menaikkan berita kekerasan seksual anak, LGBTIQ atau pornografi yang berpotensi menciptakan kepanikan moral, hal ini menjadi lebih kompleks dalam mode produksi media digital saat ini. Khalayak pada saat mengakses dan membaca kasus kekerasan seksual yang diviralkan oleh sebuah portal daring, di saat yang sama melihat iklan liburan dengan kapal pesiar atau umroh ke Mekah dengan biaya murah, atau melihat promosi film *Queer Eye* di Netflix. Tentu saja ini merupakan tawaran balik dari pola-pola ekonomi media digital yang mengutamakan *traffic*, algoritma Google dan perilaku *clickbait*.

KESIMPULAN

Teori Kepanikan Moral (TKM) yang dipopulerkan oleh Cohen pada 1972 telah beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi komunikasi massa. Memang TKM versi Cohen atau Hall dkk (1982) meski cenderung linear mempertimbangkan peran media massa dalam proses kepanikan moral. Bahkan Hall dkk melihat posisi media dalam relasi yang ideologis dan hegemonik dengan kepentingan negara dan kapital. Peran media pada TKM awal lebih pada memobilisasi massa untuk menyikapi sebuah isu. Namun TKM awal tidak melihat banyak dinamika media dan pengetahuan jurnalis serta kompleksitas relasi kuasa yang muncul dalam hubungan sosial produksi jurnalis, media dan berita yang ditulisnya.

Media dalam TKM awal dinyatakan mengikuti kekuasaan negara dan masyarakat demi “memperbaiki kerusakan moral” yang disebabkan oleh “*folk devils*”. Namun dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi mengubah banyak hal dalam elemen TKM. Mengkaji kepanikan moral pada isu seksualitas, dimensi interseksional menjadi mutlak diperlukan. Konsep-konsep seksualitas tidak hanya berhenti pada kontrol kebertubuhan melalui kuasa moral tertentu, juga merambah pada masalah ras, etnis dan paska-kolonial dan tentu saja kapitalisme media dengan logika tersendiri. Hal-hal itu berhubungan dengan pengetahuan jurnalis dalam memahami sebuah isu tertentu. Teknologi media digital dan sistem kerja jurnalisme di era digital juga menyebabkan konsep relasi kuasa menjadi lebih dinamis.

Pergeseran isu dari permasalahan sosial seperti penjangbretan, geng motor atau drug ke isu-isu seksualitas, secara teoretik menggeser beberapa hal. Pertanyaan seperti apakah elemen, proses, konsep kekuasaan yang muncul dari permasalahan sosial anak muda seperti geng motor, penjangbretan, *drug*, akan sama apabila yang terjadi adalah persoalan seksualitas yang tidak hanya melekat pada gender biner, namun juga pada keragaman gender dan seksual non-normatif. Perkembangan teknologi media massa memunculkan kompleksitas dalam kepanikan moral seksual yang tidak semata dapat dikaji dari fenomena kuasa, ideologi atau hegemoni konvensional.

REFERENSI

- Allen, P. (2007). Challenging Diversity?: Indonesia's Anti-Pornography Bill. *Asian Studies Review*, 31(2), 101-115.
- Antaraneews.com (2016). Menhan: LGBT bagian `proxy war`. <https://www.antaraneews.com/berita/546668/menhan-lgbt-bagian-proxy-war>. Diakses 2 September 2022
- Aveyard, H. (2019). *Doing a Literature Review in Health and Social Care: A Practical Guide*. London dan New York: Open University Press
- Bain, A. L., Podmore, J. A., & Rosenberg, R. (2020). 'Straightening'space and time? Peripheral moral panics in print media representations of Canadian LGBTQ2S suburbanites, 1985–2005. *Social & Cultural Geography*, 21(6), 839-861.
- Bancroft, J. (2009). *Human Sexuality and Its Problem*. 3rd edition. London: Elsevier
- Barker, T. (2018). Seks dalam Ruang Tontonan Indonesia, dalam Bennett, L. R., Davies, S.G. dan Hidayana, I.M. (editor). *Seksualitas di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, Keberagaman dan Representasi* (terjemahan). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Bellows, L. (2011). The aroused public in search of the pornographic in Indonesia. *Ethnos*, 76(2), 209-232.
- Best, Joel (2013) The problems with moral panic: The concept's limitations dalam Krinsky, Charles, editor. *The Ashgate Research Companion to Moral Panics* (h. 67-78). Farnham: Ashgate Publishing Limited
- Chimonas, S.C. (2000). *Moral Panic: Towards a New Model*. Postgraduate Department of Sociology, University of Michigan.
- Chitty, C. (2020). *Sexual Hegemony: Statecraft, Sodomy, and Capital in the Rise of the World System*. Durham and London: Duke University Press.
- Cohen, S. (2011). *Folk Devils and Moral Panics*, 3rd ed. London and New York: Routledge
- Connell, K. (2015). Policing the Crisis 35 Years On. A review article. *Contemporary British History*, 2015 Vol. 29, No. 2, 273–283
- Creswell, J. W. (2008). *Research Design-Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Edisi ketiga. Los Angeles: Sage
- Critcher, C. (2003). *Moral Panics and the Media*. London: Open University Press
- (2008). Moral Panic Analysis: Past, Present and Future *Sociology Compass* 2/4 (2008): 1127–1144
- (2009). Widening the Focus: Moral Panics as Moral Regulations. *BRIT. J. CRIMINOL.* (2009) 49, 17-34
- (2017). Moral Panics. Dalam *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*.
- Davies, S. G. (2016). Indonesian 'Tolerance' Under Strain Anti-LGBT Furore Grows. <http://asaa.asn.au/indonesian-tolerance-under-strain-as-anti-lgbt-furore-grows/>
- Denzin, N.K. dan Lincoln, Y.S. (2017). Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research; dalam Denzin, N.K. dan Lincoln, Y.S. (editor). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Fahs, B., Dudy, M., & Stage, S. (Eds.). (2013). *The Moral Panics of Sexuality*. Springer.
- Falkof, N. (2020). On moral panic: Some directions for further development. *Critical Sociology*, 46(2), 225-239.
- Foucault, M. (1978). *History of Sexuality*. Vol. 1. New York: Pantheon Books
- Giuliani, G., Garraio, J., Santos, S.J. (2020). Online social media and the construction of sexual moral panic around migrants in Europe. *Socioscapas. International Journal of Societies, Politics and Cultures* vol. 1 Issue 1, pp. X-XX.
- Goode, E dan Ben-Yehuda, N. (2009). *Moral Panics: The Social Construction of Deviance*. Edisi ke dua. Willey-Blackwell
- Gorelick, S.M. (1995). *Child, Sexual Abuse, Moral Panic and the Media: A Case Study in the Social Construction of Deviance*. Graduate program of Sociology. The City University of New York
- Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., & Roberts, B. (1982). *Policing the Crisis: Mugging, The State and Law and Order*. Macmillan International Higher Education.

- Heinrich Böll Stiftung. Behind Political Homophobia: Global LGBT Rights and the Rise of Anti-LGBT in Indonesia. <https://th.boell.org/en/2017/06/16/behind-political-homophobia-global-lgbt-rights-and-rise-anti-lgbt-indonesia> diakses 20 September 2022
- Hendrawan, B. (2009). *The Spectacle of 'Deviant' Sexuality: Moral panics, Tabloid Television and the Birth of the Post-New Order Indonesian Nation*. Master thesis. Universiteit van Amsterdam
- Herdt, G. (2009). Introduction: Moral Panics, Sexual Rights, and Cultural Anger dalam Herdt, G. (Editor). *Moral panics, sex panics: Fear and the fight over sexual rights*. NYU Press.
- Heryanto, A. (2009). Upgraded piety and pleasure: The new middle class and Islam in Indonesian popular culture, dalam Weintraub, A.N. (editor). *Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia*. London dan New York: Routledge
- Hubbard, P. (2008). Here, There, Everywhere: The Ubiquitous Geographies of Heteronormativity. *Geography Compass* 2/3 (2008): 640–658.
- ICJR (2022). Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual: Pelanggaran Hak Asasi Manusia. <https://icjr.or.id/peraturan-daerah-kota-bogor-no-10-tahun-2021-tentang-pencegahan-dan-penanggulangan-perilaku-penyimpangan-seksual-pelanggaran-hak-asasi-manusia/> diakses 1 September 2022.
- Listiorini, D., Asteria, D., & Sarwono, B. (2019a). Moral panics on lgbt issues: evidence from indonesian tv programme. *Jurnal Studi Komunikasi*, 3(3), 355-371
- Listiorini, D., D. Asteria dan I. M. Hidayana (2019b). Diskursus Ujaran Kebencian Pemerintah pada Kasus LGBT di Media Daring. *Jurnal Ilmu Komunikasi UAJY Vol. 16, No 2, Desember 2019: 243-258*
- Listiorini, D. (2020). Rezim kebenaran Media dalam Kepanikan Moral (Diskursus Foucauldian "LGBT" dalam Gelar Wicara Televisi dan Berita Daring 2016- 2018). Disertasi. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Margianto, J. H., & Syaefullah, A. (2012). *Media Online: Pembaca, Laba, dan Etika*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
- Potts, J., & Scannell, J. (2013). Introduction: What Is the Unacceptable? In *the Unacceptable* (pp. 1-20). Palgrave Macmillan, London.
- Pullen, C. (2012). *Transnational Identity and the Media*. Hampshire dan New York: Palgrave Macmillan
- Rohloff, A., Hughes, J., Petley, J., dan Chas Critcher (2013), *Moral Panics in the Contemporary World: Enduring Controversies and Future Directions* dalam Chas Critcher, Jason Hughes, Julian Petley and Amanda Rohloff (eds.), *Moral Panics in the Contemporary World*. London: Bloomsbury Academic
- Rubin, G. (2007). Thinking Sex: Notes for a radical theory of the politics of sexuality, dalam Parker, R. dan Aggleton, P. *Culture, Society and Sexuality*, Edisi ke-2. London and New York: Routledge
- Sari, H.R. (2012). Kisah perseteruan Rhoma Irama vs Inul Daratista yang melegenda. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-perseteruan-rhoma-irama-vs-inul-daratista-yang-melegenda.html>. Diakses 9 November 2022
- Smith, N. A. (2022). *The Sexual Folk Devil: Making Sense of Moral Panic in the Digital Age* (Doctoral dissertation, Columbia University).
- Suryakusuma, J. (2016). Viewpoint: State hysteria: Leading the nation with homophobia. www.thejakartapost.com. <https://www.thejakartapost.com/news/2016/02/24/view-point-state-hysteria-leading-nation-with-homophobia.html> diakses 11 September 2018
- Tempo (2003). Istri Bupati Menolak Inul. *Majalah Tempo* edisi 6 April 2003
- Tempo (2003a). Goyang Inul Goyang Politik. *Majalah Tempo* edisi 4 Mei 2003.
- Tempo (2003b). Inul, Silakan 'Ngebor'. *Majalah Tempo* edisi 4 Mei 2003.
- Tetty, W.J. (2016). Homosexuality, Moral Panic, and Politicized Homophobia in Ghana: Interrogating Discourses of Moral Entrepreneurship in Ghanaian Media. *Communication, Culture & Critique* 9 (2016) 86–106
- Thompson, K (2005). *Moral Panics*. Taylor and Francis e Library.
- Van Wichelen, S, (2016) "My Dance Immoral? Alhamdulillah No!" Dangdut Music and Gender Politics dalam Franklin, M. I. (Ed.). *Resounding International Relations: on music, culture, and politics*. Springer.
- Vincent, L. (2009). Moral Panic and The Politics of Populism. *Representation*, 45:2, 213-221.
- Wieringa, S. (2009). Postcolonial Amnesia: Sexual Moral Panics, Memory, and Imperial Power dalam Herdt, G. (Editor). *Moral panics, sex panics: Fear and the fight over sexual rights*. NYU Press.
- Wieringa, S. (2010). Communism and women's same-sex practises in post-Suharto Indonesia. *Culture, Health & Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care*, 2:4, 441-457
- Wieringa, S. (2014). Sexual Politics as a Justification for Mass Murder in the Act of Killing. *Critical Asian Studies*, 46:1, 195-199

- Wieringa, S dan Katjasungkana, N. (2019). *Propaganda and the Genocide in Indonesia: Imagined Evil*. London dan New York: Routledge.
- Wijaya, H.Y. (2020). *Intimate Assemblages: The Politics of Queer Identities and Sexualities in Indonesia*. Singapore: Palgrave Macmillan
- Young, J. (2011). Moral Panic and the Transgressive Other. *Crime Media Culture* 7(3) 245–258
- Zakiah, N. R., dan Az Zahra, A. (2016). *LGBT=Nuklir? Indonesia Darurat Fobia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.